

BAB I

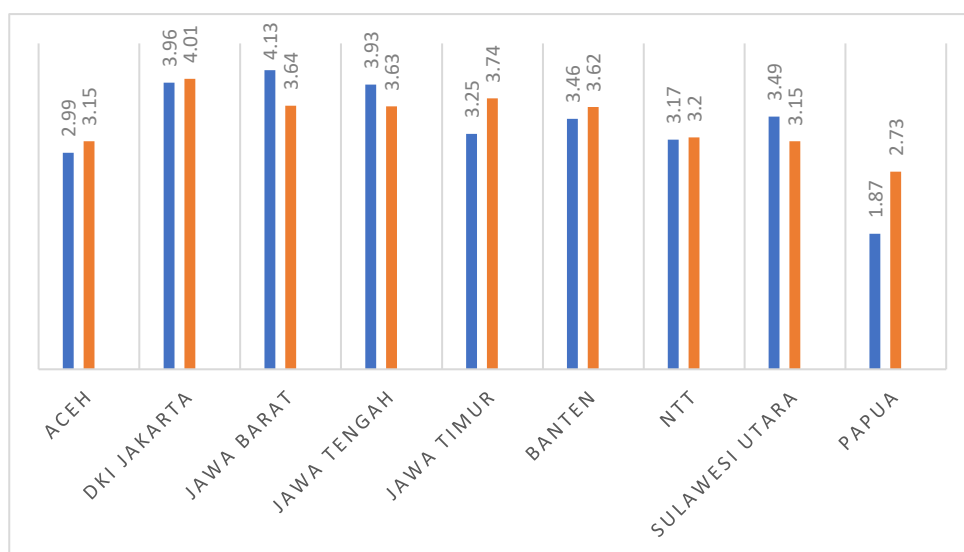
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi dengan didasarkan pada riset merupakan faktor kunci dalam menentukan kemampuan daya saing suatu negara. Untuk tetap beradaptasi dan bersaing dalam perekonomian global saat ini, negara harus menempatkan investasi pada riset dan memberikan perhatian yang besar terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pengetahuan. Menurut *World Economic Forum* (2019), riset berperan penting dalam memberikan sumber daya yang berkualitas. Tanpa riset, inovasi hanya menghasilkan kebaruan sederhana yang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi (Bustomi, 2023). Di Indonesia, aktivitas inovasi tanpa melibatkan riset di sektor produksi telah terjadi sejak lama. Rendahnya kinerja riset dalam mendukung meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan industri atau masyarakat (Fuady, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat memfasilitasi inovasi di sektor produksi melalui kebijakan publik. Namun, hingga saat ini peran inovasi dalam mendukung daya saing di sektor produksi, serta kontribusinya terhadap perekonomian dan pembangunan nasional masih belum optimal (Sumahir & Wahyudi, 2022). Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disahkan guna menjawab permasalahan dan kebutuhan akan pemanfaatan pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah dalam membuat kebijakan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menginisiasi pengukuran Indeks Daya Saing Daerah dengan menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran dari *Global Competitive Index* (GCI) dari *World Economic Forum* yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Komponen pembentuk daya saing daerah terdiri dari empat indikator yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.



Gambar 1.1 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2022

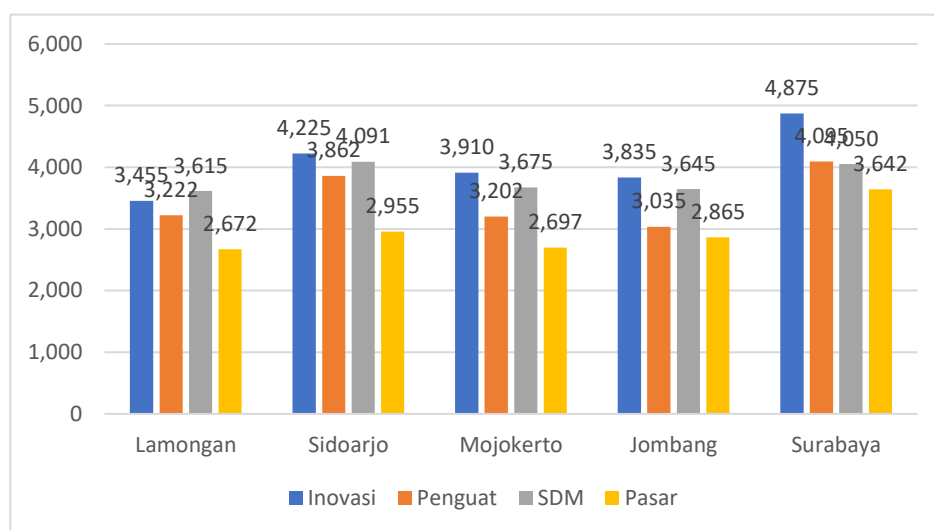
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional Nasional 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan Indeks cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Namun, nilai Indeks Provinsi Jawa Timur relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Prasetyo et al., (2020) mengemukakan bahwa nilai Indeks Daya Saing Provinsi sangat tergantung dari kemampuan daerah lingkup regional dalam meningkatkan perekonomian yang selanjutnya dapat menguatkan daya saing daerah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Fatimah et al., (2022) dimana nilai indeks daya saing daerah merupakan cerminan dari tingkat produktifitas suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya.

Di Indonesia, istilah inovasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintah mulai mulai banyak diperbincangkan terutama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perbaikan iklim ekonomi (Bustomi, 2023). Haryono & Heri (2021) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan membawa pembangunan Indonesia ekstraktif menuju pembangunan yang inklusif dapat dicapai dengan peningkatan akumulasi modal melalui inovasi. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah bukan lagi pada otonomi daerah maupun desentralisasi, tetapi menuntut daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, dimana kemampuan perekonomian mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (Mesoino et al., 2022). Urgensi penguatan daya saing dalam konteks kebijakan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi serta input bagi perencanaan pembangunan daerah.

Daya saing tidak hanya tergantung pada bidang ekonomi, tetapi di bidang sosial dan kontribusi kepada masyarakat. Deskripsi daya saing daerah tersebut tanpa proses inovasi tidak dapat berkembang dengan baik, proses inovasi tanpa adanya intervensi kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal (Dogan, 2016). Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan, dibarengi dengan konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi masalah sosial dan ekonomi. dengan melihat dinamika pembangunan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah (Mudyanti & Trihutomo, 2022). Hal ini sangat penting agar ritme pembangunan yang mengalami perubahan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan.

Secara umum inovasi daerah masih dihadapkan pada dua kendala yang menjadi tantangan utama yaitu keterbatasan kapasitas investasi nasional di sektor industri hilir untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan belum siapnya teknologi nasional untuk menyokong tumbuh kembang industri tersebut (Mayangsari & Retnaningsih (2020). Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah.



Gambar 1.2 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Jombang masih relatif tertinggal dari beberapa daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan studi dari Mudyanti & Trihutomo (2022) menemukan bahwa aspek yang sangat menentukan daya saing daerah Kabupaten Jombang adalah dari aspek penguat, dan berdasarkan hasil *Importance Performance Analysis (IPA)*, indikator yang relatif paling mendominasi (jumlah indikator terbanyak) adalah indikator pembentuk aspek ekosistem inovasi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun aspek ekosistem inovasi di Kabupaten Jombang relatif mendominasi dalam membentuk daya saing, namun perlu adanya perbaikan yang signifikan.

Kabupaten Jombang dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang diprioritaskan dalam mendukung meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menginisiasi pelaksanaan fasilitasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja (PPMBK) yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Jombang dan mitra masyarakat sebagai sasaran program.

Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan riset dan inovasi di daerah melalui peran aktif perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat sehingga dapat menciptakan ekosistem inovasi dan daya saing daerah di Kabupaten Jombang. Transfer pengetahuan antara organisasi dan agensi luar adalah transfer horizontal dengan transfer pengetahuan antara bisnis dan para pesaingnya untuk tujuan pengembangan produk baru atau pengembangan inovatif, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja bisnis dan keunggulan kompetitif (Distanont & Khongmalai 2020).

Institusi dapat mengkondisikan proses akumulasi modal pembangunan suatu daerah, hal tersebut dikarenakan bahwa institusi dapat meningkatkan kapasitas kewirausahaan serta memperkuat jaringan dan kerjasama antar stakeholders. Faktor institusi mencakup berbagai aspek pemerintahan dan tata kelolanya, tidak hanya merujuk pada peran sektor publik tetapi juga sektor swasta, dan struktur masyarakat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran ide kreatif antar stakeholders yang memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi (Nugraha et al., 2022).

Penerima manfaat dari adanya program ini adalah mitra atau kelompok masyarakat yang menggunakan produk hasil inovasi dari hasil akumulasi pengetahuan oleh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jombang. Terdapat lima mitra yang menjadi sasaran dari Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPMBK) dengan output atau hasil inovasi yang berbeda-beda.

Tabel 1.1 Daftar Peserta Program PPMBK

LPPM	Judul	Sasaran	Output
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang	Akselerasi Pentahelix Pengembangan Desa Wisata "PANDAN SILI" Berbasis Partisipasi Masyarakat	Kelompok Sadar Wisata Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang	Alat Pembuat Paving
Universitas Wahab Hasbullah Jombang	<i>Automatic Solar Blue Light Trap</i> Pengendali Hama Serangga Bagi Komoditas Bawang Merah	Kelompok Petani bawang merah di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh	<i>Automatic Solar Blue Light Trap</i>
Universitas Darul Ulum Jombang	Penerimaan dan Penggunaan Sistem Koperasi Berkelanjutan Berbasis Manajemen Mandiri	Koperasi Serba Usaha Gambuh Desa Gongseng Kecamatan Megaluh	Aplikasi Sistem Koperasi
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jombang	Resilien Sity (Remaja Siap Peduli Bencana dengan Simulasi Virtual Reality)	Karang Taruna Desa Bugasurkedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang	<i>Virtual Reality</i>
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jombang	Peningkatan Kualitas Hidup Lansia melalui Pengembangan Aplikasi Galasema (Gerakan Lansia Sehat dan Mandiri)	Posyandu Lansia Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	Aplikasi Galasema (Gerakan Lansia Sehat dan Mandiri)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2022

Secara keseluruhan daftar usulan yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebanyak 16 (enam belas) usulan dan yang berhasil pada tahap implementasi dan diterapkan di masyarakat mitra atau sasaran terdapat 5 (lima) usulan yang terdiri dari bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan bidang sosial pemerintahan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang berbeda.

Okuputra (2022) menjelaskan bahwa bagian utama dalam sebuah program adalah pengelola yang profesional, bertanggung jawab, dan berdedikasi sehingga mampu mengelola dan memberikan yang terbaik untuk kegiatannya. Partisipasi dan dukungan berbagai pihak juga berpengaruh terhadap efektivitas sebuah program agar berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengembangan ekonomi daerah yang pendekatannya berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Adiyadnya, 2015).

Tabel 1.2 Anggaran Kegiatan PPMBK

Bidang	Judul	Anggaran
Ekonomi dan Pembangunan	Akselerasi Pentahelix Pengembangan Desa Wisata "PANDAN SILI" Berbasis Partisipasi Masyarakat	Rp.30.100.000
	Aplikasi Automatic Solar Blue Light Trap Pengendali Hama Serangga Bagi Komoditas Bawang Merah	Rp. 26.670.000
	Penerimaan dan Penggunaan Sistem Koperasi Berkelanjutan Berbasis Manajemen Mandiri	Rp. 26.670.000
	Resilien Sity (Remaja Siap Peduli Bencana dengan Simulasi Virtual Reality)	Rp. 26.670.000
Sosial dan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Hidup Lansia melalui Pengembangan Aplikasi Galasema (Gerakan Lansia Sehat dan Mandiri)	Rp. 26.670.000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dari masing-masing program adalah sebesar Rp 26.670.000 dan untuk alat inovasi pembuat paving dengan ampas limbah tebu adalah yang paling besar adalah Rp. 30.100.000. Perbedaan dalam perencanaan anggaran didasarkan pada kerumitan dan kompleksitas hasil inovasi oleh pelaksana dan mitra program penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kinerja (PPMBK).

Pemerintah daerah dalam rangka memajukan dan meningkatkan daya saing daerah harus adaptif dan terbuka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pemerintah daerah diberikan kesempatan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menjalin kemitraan melakukan berbagai riset yang berkontribusi bagi kemajuan daerah (Sahrin & Arafat, 2022). Pendapat serupa juga dikemukakan Desrinelti et al., (2021) sebuah rangkaian aktivitas, aksi dan rencana program dan keputusan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan publik sebagai upaya memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi.

Program PPMBK merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan sebuah inovasi di lingkungan masyarakat guna memberikan kemudahan dan produktifitas kepada masyarakat. Wibowo et al., (2021) tranformasi dari pengelolaan secara konvensional menjadi digital dapat mengatasi permasalahan pengelolaan dengan biaya akumulasi yang tinggi. Pendapat lain dari Sumahir & Wahyudi (2022) bahwa penerapan inovasi teknologi di bidang ekonomi berdampak signifikan terhadap produktifitas akhir barang atau jasa yang dihasilkan. Investasi di bidang riset selalu berjalan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia secara maksimal.

Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan tidak selalu berjalan dengan harapan, pemanfaatan dana pemerintah yang tidak efektif juga menghambat perkembangan inovasi daerah (Ananta et al., 2021). Hal ini bertolak belakang dengan sisi teori kaitan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dimana pemerintah melakukan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Firstiani & Egamawati, 2021). Namun, kerangka regulasi tersebut yang dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan sistem birokrasi masih mengalami kesulitan dalam menjalankan tata kelola yang efektif dan efisien.

Fuady (2020) mendefinisikan proses inovasi sebagai proses yang kompleks dan tidak bisa dianggap sebagai hal sederhana, melainkan memerlukan aspek lain dalam konteks organisasi pada sektor publik melalui kebijakan. Suatu inovasi dapat dikatakan berhasil jika inovasi tersebut adalah kreasi dan pelaksanaan dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru kemudian menghasilkan perubahan nyata guna mendapat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan program yang ditetapkan (Adiyadnya, 2015).

Rendahnya adopsi hasil riset dan teknologi oleh industri atau pengguna teknologi lainya masih menjadi persoalan nasional (Sari, 2020). Hal tersebut memiliki kaitan dengan penyebarluasan hasil-hasil kelitbangan dari berbagai lembaga penelitian yang masih belum optimal. Mekanisme penyebaran yang belum terkoordinir secara melembaga, serta terbatasnya hasil litbang yang sesuai kebutuhan dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah penting dalam sektor publik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Eprilianto et al., 2019).

Dalam konteks ini kapasitas inovator menjadi semakin penting dalam melakukan sebuah inovasi karena akan memberikan banyak manfaat. Peran pemerintah tersebut akan berjalan efektif apabila output kebijakan publik mampu beradaptasi dan berinovasi terhadap berbagai perubahan dalam mendorong sinergitas antara berbagai kepentingan (Sururi, 2014). Sebuah proses partisipatif dimana masyarakat dari semua sektor bekerja sama untuk merangsang kegiatan komersial lokal menghasilkan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan (Kusuma, 2022).

Berbagai Inovasi yang dihasilkan dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kinerja (PPMBK) oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, namun demikian pemanfaatan hasil inovasi oleh masyarakat mitra atau kelompok sasaran masih belum optimal. Inovasi yang ada saat ini masih bersifat sporadis (muncul atas dasar ide saat itu), parsial (tidak terkoneksi dengan inovasi lain), manfaat kurang optimal dan kurang membentuk *multiplier effect*, serta *stagnan* (tidak terjamin keberlanjutannya) (Wismono et al 2019). Oleh karena masih adanya fakta di atas terkait perencanaan, implementasi, dan pengembangan kebijakan, maka perlu penanganan yang tepat dan efisien agar inovasi daerah dapat berkembang secara optimal dan efektif guna pengembangan ekonomi regional.

Dari paparan latar belakang tersebut, maka sepatutnya riset dan pengembangan, kemudian inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mampu diperhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan daya saing yang tepat sasaran dan sesuai prioritas kebutuhan daerah dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah. Dari beberapa uraian di atas, peneliti berfokus menganalisis implementasi kebijakan daya saing daerah melalui program PPMBK yang saat ini menjadi isu strategis daerah dalam menjadikan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangkang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja (PPMBK) di Kabupaten Jombang: Studi pada Fasilitator, Pelaksana dan mitra program PPMBK.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang dijabarkan, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana tingkat efektivitas Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja (PPMBK) di Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektivitas Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja (PPMBK) di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran tingkat efektivitas program penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kinerja di Kabupaten Jombang
- b. Sebagai penerapan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan teori kebijakan publik dan efektivitas program inovasi daerah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan bagi penyelenggara program dalam membuat kebijakan terkait inovasi daerah dan memberikan wawasan dalam mengembangkan hasil inovasi daerah.
- b. Bagi Masyarakat, mengidentifikasi kesesuaian hasil inovasi yang kebutuhan masyarakat dalam upaya pemberdayaan